



@is The Best :

Accounting Information Systems and  
Information Technology Business Enterprise  
Volume 6, Nomor 2 (2021) Hal. 121-135  
ISSN: 2252-9853 (Print) | ISSN: 2656-808X (Online)  
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/aisthebest/index>

Terakreditasi Peringkat 4, SK No.: 28/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i2.5000>

## Peran Anggaran Informasi Akuntansi Terhadap Pusat Pertanggungjawaban Biaya

Lesi Hertati

Universitas Indo Global Mandiri, Jl. Jend. Sudirman No.Km.4 No. 62, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
Email: [hertatilesi@yahoo.co.id](mailto:hertatilesi@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

Responsibility arises because of the delegation of authority from a higher level of management to a lower level. To know responsibilities, lower management must know clearly what authority should be delegated by their superiors. Lower management should be responsible for the execution of the authority assigned to it. Therefore, the need arises for the organization that is authorized for accounting accounting to assess the accountability of the exercise of authority. Validity tests were carried out which were used to determine the items in the list of questions to determine the variables being tested. The variant known as SEM PLS to test the hypothesis is carried out to test exogenous variables against endogenous variables directly, namely by comparing *t*-tables and *t*-counts. Each result of this calculation is then compared with the *t*-table obtained using an error level of 0.05. The target population of this study is the district/city SKPD in South Sumatra. The data collection that became the primary data source was the method of collecting data which was carried out by the author himself directly to the object of research. The method is obtained by: (a) Interview (Interview) and (b) Observation (Observation). Then secondary data is data collection in the form of publication results or data that has been collected by other parties or agencies. The method obtained by collecting data where the data related to the object of research obtained. This study is to determine the role of the budget, accounting information on the responsibility center. The results of the study prove that the budget responsibility center can be used to monitor, analyze, implement, control and make decisions. The data collection method uses the Structural Equation Model (SEM) with the Partial Least Square (PLS) method.

**Keywords:** Budget, Accounting information, Cost Accountability Center

### ABSTRAK

Tanggungjawab timbul karena adanya pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Untuk mengetahui tanggung jawabnya, manajemen bawah harus mengetahui dengan jelas wewenang apa yang harus didelegasikan oleh atasannya. Manajemen bawah harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, timbul kebutuhan organisasi akan wewenang informasi akuntansi untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Uji validitas dilakukan yang digunakan untuk menentukan kelayakan item dalam daftar pertanyaan untuk menentukan variabel yang di uji. Varians yang dikenal SEM PLS untuk menguji hipotesis dilakukan untuk menguji variabel eksogen terhadap variabel endogen secara langsung yaitu dengan membandingkan *t*-tabel dan *t*-hitung. Masing-masing *t* hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan *t* - tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Populasi target dari penelitian ini adalah SKPD kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Pengumpulan data yang menjadi sumber data Primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Adapun metode ini diperoleh dengan cara: (a) Wawancara (Interview) dan (b) Observasi (Observation). Kemudian data Sekunder yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk hasil publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain. Adapun metode ini diperoleh dengan cara pengumpulan data dimana data-data yang berhubungan dengan objek penelitian diperoleh. Penelitian ini untuk mengetahui peran anggaran, informasi akuntansi terhadap pusat pertanggungjawaban biaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa pusat pertanggungjawaban anggaran dapat digunakan untuk mengawasi, menganalisis, melaksanakan, mengendalikan dan mengambil keputusan. Metode pengumpulan data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS).

**Kata Kunci:** Anggaran, Informasi akuntansi, Pusat Pertanggungjawaban Biaya

## Pendahuluan

Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang disusun secara sistematis meliputi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu/periode tertentu[1]. Kepala daerah harus dapat mengelola anggaran pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran yang diterima. Anggaran tersebut serta realisasinya memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal pada daerah tersebut. Anggaran disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih. Kepala daerah harus dapat mengelola anggaran pemerintah daerah guna agar pusat ekonomi daerah dapat berkembang serta mempunyai jaringan operasi yang kuat dalam rangka mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah kondisi wabah Covid saat ini. Tujuan anggaran pemerintah daerah dalam pemanfaatan APBD adalah untuk mendapatkan laba yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dan memberikan keuntungan bagi daerah tersebut. Semakin besar dan berkembang suatu daerah maka akan semakin besar pula persoalan yang dihadapi oleh Kepala daerah harus dapat mengelola anggaran pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus mengelola anggaran dengan baik, oleh karena itu diperlukan informasi yang jelas dan terperinci tentang program pemerintah daerah untuk disampaikan kepada masyarakat. Anggaran dikatakan sebagai fungsi perencanaan di mana anggaran memberikan gambaran yang jelas dan menjadi pedoman penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan atau organisasi. Sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi[2][3].

Program-program yang akan dilakukan pemerintah daerah harus sesuai dengan rencana agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Daerah bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan dalam pemerintahannya. Begitupun pimpinan harus bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu penyimpangan. Sehingga penyimpangan tersebut ditelusuri, dievaluasi dan dilakukan perbaikan agar penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi. Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan dan operasional pemerintahannya. Namun untuk memenuhi biaya tersebut, Kepala Daerah dihadapkan dengan berbagai masalah seperti sulitnya menutup kekurangan biaya yang dibutuhkan atau tentang bagaimana memanfaatkan biaya yang dimiliki daerah tersebut agar efektif dan efisien. Fungsi Pelaksanaan dalam pemerintahanpun menjadi salah satu pedoman yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik agar program-program atau pekerjaan tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah[4].

Berdasarkan fenomena yang terjadi ketika forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan, aroma egosentris sangat kental, hal tersebut sering dijadikan celah untuk memasukkan keinginan pribadi melalui negosiasi forum. Sehingga program yang diusulkan tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sama halnya yang terjadi ketika proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, sebagai pedoman penyusunan APBD. Di sini sering disusupkan program-program “siluman”. Selain itu, usulan dari bawah (*bottom up*) melalui mekanisme Musrenbang selalu hanya menjadi formalitas saja. Usulan yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat (*top down*) tidak diakomodir. Akibatnya proses perencanaan anggaran daerah di Indonesia umumnya hanya bersifat sosialisasi. Inilah yang menyebabkan belum adanya integrasi antara *bottom up* dan *top down* [5].

Akibat pandemi, kondisi ekonomi daerah ikut terdampak sehingga penerimaan daerah terganggu baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Terutama bagi daerah yang sumber pendapatannya dari sektor pariwisata. Pandemi corona juga berdampak pada penurunan anggaran transfer daerah terutama dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga mempengaruhi APBD dari sisi penerimaan daerah. Daerah akan mengalami kekurangan pada penerimaan yang cukup

besar. Sehingga dengan adanya peningkatan pada defisit ini diharapkan agar daerah dapat menutupi kebutuhan anggarannya[6].

Agar tidak terjadi permasalahan dalam kekurangan atau kelebihan biaya pada APBD, Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan secara tepat taksiran biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pada periode selanjutnya. Dengan menyusun anggaran pemerintah mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang akan datang. Anggaran dapat menjadi gambaran untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari usaha pada masa yang akan datang. Perbedaan antara anggaran dengan realisasinya dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan selanjutnya. Perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien dalam suatu perusahaan, sangat memerlukan informasi akuntansi, salah satunya berupa anggaran yang tepat dan akurat. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang atas terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Pengendalian biaya dilakukan dengan cara membuat tim dalam pusat biaya dengan peran untuk merencanakan biaya yang terjadi dan menyiapkan informasi realisasi biaya tersebut. Sehingga untuk kebutuhan pengendalian tersebut dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen memerlukan informasi perusahaan yang berhubungan dengan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Informasi penyimpangan yang merupakan selisih antara anggaran biaya dengan realisasinya akan digunakan untuk menilai kinerja dalam periode tersebut dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam merencanakan anggaran biaya untuk tahun depan agar mencapai target dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk efisiensi dan efektifitas biaya yang dikeluarkan, dibutuhkan pengendalian anggaran dalam pelaksanaannya dan dianalisis secara terus-menerus agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan dari rencana anggaran[7][8][9].

Organisasi yang baik akan melaksanakan kegiatannya dengan cara terstruktur untuk pengambilan keputusan dengan perhitungan dan pertimbangan perencanaan dan pengendalian yang tepat, disebut merencanakan anggaran yang efektif dan efisien. Perbandingan dan analisa biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan rencana kegiatan, yang pada gilirannya dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan tindakan koreksi. [10].

Anggaran biaya adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun[11]. Anggaran biaya adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu [12]. Anggaran biaya adalah rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya [13]. Anggaran biaya merupakan rencana kerja tentang aktivitas kegiatan yang dilakukan di waktu yang akan datang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam berdasarkan jangka waktu tertentu. Anggaran yang komprehensif disusun, dan disetujui oleh manajemen puncak kemudian dikomunikasikan kepada penyelia dan manajemen yang kinerjanya dikendalikan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik [14].

Anggaran biaya dalam suatu perusahaan mutlak sekali diperlukan karena berfungsi sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam mengukur dan menentukan tingkat pembiayaan operasional dapat diterapkan

dalam berbagai macam usaha, terutama pada perusahaan yang lebih maju dalam mengelola perusahaannya dan akan berbeda antar perusahaan tergantung kondisi perusahaannya masing-masing. Namun, dalam teknik dan prosedur pelaksanaannya banyak kesamaan karena dilandasi oleh teori yang sama. Berikut adalah karakteristik anggaran:

1. Anggaran biaya dinyatakan dalam satuan moneter  
Bertujuan untuk mempermudah dalam membaca rencana tersebut. Karena itu sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
2. Anggaran biaya mengandung komitmen atau kesanggupan manajemen  
Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen, penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan.
3. Usulan anggaran biaya disetujui oleh pejabat/pihak yang berwenang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran, anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.
4. Anggaran disusun berdasarkan program  
Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka angka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik.
5. Anggaran Operasional  
Bertujuan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti: penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi dan lain-lain serta biaya dan laba yang dihasilkan. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu perkiraan laporan laba rugi.
6. Anggaran Keuangan  
Anggaran yang merinci kas masuk dan kas keluar serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan neraca. Serta anggaran modal mengenal rincian untuk pembelian aktiva jangka panjang dan membeli hal lainnya untuk periode di masa mendatang.

Informasi merupakan suatu fakta, data pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan informasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan di antara sekian banyak alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, pengambil keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut [15]. Revolusi Industri 4.0, yang menandai adanya era ekonomi digital dengan otomatisasi mekanis dalam menjalani laju perekonomian. Istilah lain untuk revolusi industri adalah revolusi digital dan era korupsi teknologi. Revolusi digital ini merupakan proses proliferasi komputer dan otomatisasi proses perekaman di berbagai bidang. Fase keempat dari revolusi teknologi ini mengubah cara manusia bergerak dan berinteraksi dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya sehingga manusia dapat merasakan kehidupan dalam ketidakpastian global[16].

Berbagai tipe informasi yang kemungkinan diperlukan oleh pengambil keputusan. Di antara berbagai tipe informasi tersebut, akuntansi merupakan salah satu informasi kuantitatif, dan akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi-informasi akuntansi di antara dua tipe informasi yang lain yaitu informasi operasi dan informasi akuntansi keuangan. Manajemen memerlukan informasi, baik yang berupa informasi kuantitatif maupun Informasi nonkuantitatif

sebagai dasar pengambilan keputusan. Umumnya informasi kuantitatif lebih berperan dalam mengurangi ketidakpastian bila dibandingkan dengan informasi nonkuantitatif, sehingga umumnya dalam pengambilan keputusan bisnis, manajemen lebih bertumpu pada informasi kuantitatif yang menjadikan pengambil keputusan lebih memperoleh jaminan kepastian dalam pemilihan alternatif dibandingkan dengan informasi nonkuantitatif [17][18]. Informasi diperlukan oleh manajemen dalam mengelola suatu organisasi, terutama dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat, informasi haruslah diolah terlebih dahulu agar siap untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan, argumen, peramalan, keputusan, atau tindakan, baik yang berorientasi jangka panjang dihasilkan pendek. Informasi akuntansi merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari suatu sistem dapat dibedakan menjadi 5 golongan menurut [19] yaitu suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Accuracy*

Idealnya, semua informasi harus akurat tetapi peningkatan ketelitian sistem menambah biaya. Karena alasan tersebut, manajer terpaksa menerima ketelitian yang kurang dari sempurna. Berbagai aplikasi yang melibatkan uang, seperti pembayaran gaji, penagihan, dan piutang, menuntut ketelitian 100%. Beberapa aplikasi lain, seperti ramalan ekonomi jangka panjang dan laporan statistik, sering dapat tetap berguna jika datanya mengandung sedikit kesalahan.

2. *Relevancy*

Informasi memiliki relevansi jika berkaitan langsung dengan masalah yang ada. Manajer harus mampu memilih informasi yang diperlukan tanpa membaca seluruh informasi mengenai subyek lain.

3. *Timeliness*

Informasi harus tersedia untuk memecahkan masalah sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menggambarkan apa yang sedang terjadi sekarang, selain apa yang telah terjadi di masa lampau.

4. *Completeness*

Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. Namun, rancangan sistem seharusnya tidak menenggelamkan manajer dalam lautan informasi. Istilah kelebihan informasi mengakui adanya bahaya dari informasi yang terlalu banyak. Manajer harus mampu menentukan jumlah rincian yang diperlukan.

Informasi akuntansi yang digunakan oleh pusat biaya yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah biaya [20]. Dimana pusat biaya merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, karena tidak ada biaya yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk mengendalikan pusat biaya. Dalam hal penilaian prestasi manajer pusat biaya dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya yang dicapai oleh pusat biaya dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Perbandingan tersebut akan menimbulkan selisih antara anggaran dan realisasinya. Selisih tersebut akan menggambarkan adanya perbedaan atau penyimpangan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya [21]. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari komponen-komponen baik fisik maupun non fisik yang terintegrasi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajer maupun pihak luar [22].

Realisasi biaya menunjukkan hasil yang lebih kecil daripada yang dianggarkan maka selisih tersebut menguntungkan. Sebaliknya jika realisasi lebih besar daripada anggaran maka selisih tersebut merugikan. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian yaitu menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran haruslah memenuhi syarat partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran biaya. Menurut karakteristik masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat digolongkan menjadi empat golongan: pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi.

Perusahaan yang bekerja dengan menggunakan anggaran formal dengan cepat betapa besar manfaat yang didapat dari suatu anggaran, dan sama sekali tidak akan mempunyai pikiran untuk kembali kebiasaan yang lama, yaitu bekerja tanpa anggaran. Perusahaan bias mencapai tingkat kesuksesan tertentu tanpa menggunakan anggaran, tidak akan pernah mencapai tingkat kesuksesan setinggi yang dapat dicapai dengan sistem anggaran yang terkoordinasi. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi di masa yang akan datang adalah untuk penyusunan anggaran. Sedangkan manfaat informasi yang berupa informasi masa lalu sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer. [23] Akuntansi pertanggungjawaban memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan anggaran

Suatu rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan (M Nafarin). Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu

2. Penilai kinerja pusat pertanggungjawaban

Untuk memotivasi manajemen dalam mencapai sasaran organisasi guna mematuhi standard perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya dalam membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

3. Pemotivasi manajer

Alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang seseorang memiliki motivasi tinggi memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.

Proses penyusunan anggaran biaya pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran pemerintah daerah. Penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi kepala dinas daerah yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian sasaran perusahaan [24][25][26][27].

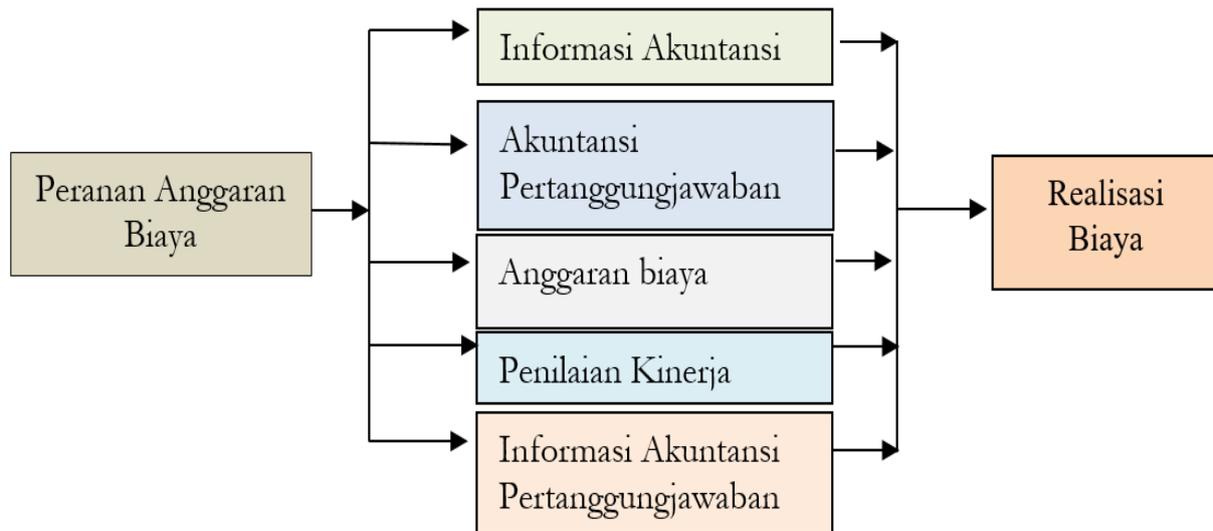
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan, dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (*score*) yang dibuat

oleh manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. Informasi akuntansi yang dihubungkan dengan manajer yang memiliki peran digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Informasi akuntansi demikian disebut dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban [28][29].

Hipotesis:

H1 : Pengaruh anggaran terhadap pusat pertanggungjawaban biaya

H2 : Informasi terhadap pusat pertanggungjawaban biaya



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## Metode

Populasi dari penelitian ini adalah SKPD kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data penelitian ini dikumpul dengan google form dan via e-mail. Pengumpulan data yang menjadi sumber data Primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Adapun metode ini diperoleh dengan cara:

- Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab terhadap pimpinan perusahaan dan para karyawan yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.
- Observasi (*Observation*) yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti untuk mengumpulkan data dan melihat keadaan sebenarnya, meliputi keadaan fisik perusahaan, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan karyawan dan lain sebagainya.

Kemudian data Sekunder yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk yang sudah terjadi berupa hasil publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain. Adapun metode ini diperoleh dengan cara pengumpulan data dimana data-data yang berhubungan dengan objek penelitian diperoleh. Proses pemilihan dan sampel pada SKPD yang terkait sangat penting untuk pengumpulan data bagi peneliti, dapat memberikan respons yang dituju [30] Secara keseluruhan, proses pengumpulan data telah diambil selama 4 bulan dan penelitian ini tidak didanai oleh organisasi apa pun.

Uji validitas dilakukan yang digunakan untuk menentukan kelayakan item dalam daftar pertanyaan untuk menentukan variabel yang di uji. Analisis deskriptif dilakukan dengan kategorisasi

yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan 1 sampai 5 [30] Varians yang dikenal SEM PLS untuk menguji hipotesis dilakukan untuk menguji variabel eksogen terhadap variabel endogen secara langsung yaitu dengan membandingkan *t-tabel* dan *t-bitung*. Masing-masing *t* hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan *t - tabel* yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Berikut ini rumus uji *t* secara parsial sebagai berikut[30]:

$$t = r \sqrt{\frac{n - 2}{1 - r^2}}$$

dimana:

*t* : distribusi t

*r* : koefisien korelasi

*n* : jumlah data

Hipotesis:

$H_0 = 0$  : Pengaruh anggaran terhadap pusat pertanggungjawaban biaya

$H_a \neq 0$  : Informasi terhadap pusat pertanggungjawaban biaya

## Hasil dan Pembahasan

### Data Analisis

Hasil pengolahan data terlihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Loading factor*

No.	<i>Loading factor</i> masing-masing indikator	Sistem Pengendalian Intern	Penjualan Tunai	Penerimaan Kas Pengelolaan Aset Daerah
1.	Indikator 1	0.731	-	-
2.	Indikator 2	0.894	-	-
3.	Indikator 3	0.796	-	-
4.	Indikator 4	0.827	-	-
5.	Indikator 5	0.452	-	-
6.	Indikator 6	0.371	-	-
7.	Indikator 7	0.766	-	-
8.	Indikator 8	0.796	-	-
9.	Indikator 9	0.766	-	-
10	Indikator 10	0.796	-	-
11	Indikator 11	0.796	-	-
12	Indikator 12	0.796	-	-

No.	<i>Loading factor</i> masing-masing indikator	Sistem Pengendalian Intern	Penjualan Tunai	Penerimaan Kas Pengelolaan Aset Daerah
13	Indikator 13	-	0.796	-
14	Indikator 14	-	0.796	-
15	Indikator 15	-	0.736	-
16	Indikator 16	-	0.796	-
17	Indikator 17	-	0.756	-
18	Indikator 18	-	0.786	-
19	Indikator 19	-	0.796	-
20	Indikator 20	-	0.796	-
21	Indikator 21	-	0.786	-
22	Indikator 22	-	0.796	-
23	Indikator 23	-	-	0.869
24	Indikator 24	-	-	0.869
25	Indikator 25	-	-	0.889
26	Indikator 26	-	-	0.879
27	Indikator 27	-	-	0.859
28	Indikator 28	-	-	0.879

Tabel 2 Hasil Uji. Hasil Square roots of AVE

No	Variabel	Square roots of AVE
1.	Anggaran	0.829
2.	Informasi akuntansi	0.749
3.	Pusat Pertanggungjawaban Biaya	0.832

Tabel 3. Hasil Uji *Composite Reliability*

No.	Variabel	Composite reliability	Cronbach's Alpha
1.	Anggaran	0.936	0.822
2.	Informasi akuntansi	0.920	0.836
3.	Pusat Pertanggungjawaban Biaya	0.910	0.861

Tabel 4. Hasil Uji *Goodness of fit* pada *inner* model diukur menggunakan *R square*

No.	Model	R square
1.	Pusat Pertanggungjawaban Biaya	0.159

Tabel 5. Hasil Uji *Q square*

No.	Model	Q square
1.	Pusat Pertanggungjawaban Biaya	0.359

Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh langsung

No.	Pengaruh Langsung	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
1	Anggaran - Pusat Pertanggungjawaban Biaya	-0.508	0.053	Diterima
2	Informasi akuntansi - Pusat Pertanggungjawaban Biaya	0.570	0.004	Tidak Diterima

Setiap variabel laten dependen pengujian yang dilakukan dalam *inner model* dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat  $R^2$  untuk. Perubahan nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif Hasil AVE menunjukkan bahwa indikator yang dimiliki oleh masing-masing variabel dapat mengukur variabel yang dimaksud. *Discriminat validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dimana nilai AVE harus  $> 0,50$ . Hasil composite reliability menunjukkan bahwa masing-masing indikator dapat mengukur variabel dengan reliable. *Composite*

*reliability* blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* yang dikembangkan oleh Werta, Linn, dan Joreskog dan *Cronbach's Alpha*. Dimana nilai *composite reliability* yang baik apabila nilainya  $> 0,70$ .

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji cronbach alpha menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $> 0,60$ . *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* *warp* PLS 5.0. Metode ini dicetuskan pertama kali oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan *multiple* indikator. PLS merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil [31] Hal ini dirasakan sangat penting oleh responden untuk mencapai Penerimaan Kas Pengelolaan Aset Daerah dalam menaikkan pengendalian intern. Namun terdapat kelemahan yang dirasakan oleh responden yaitu pada Sebelum keputusan diambil, kepala daerah meyakinkan mengumpulkan informasi dengan akurat dan lengkap sebelum mengambil keputusan yang cepat, akurat anggaran dan informasi akuntansi sehingga pusat pertanggungjawaban biaya akurat.

## Pembahasan

Pusat tanggungjawab menyatakan bahwa pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang di lakukan. [32] definisi pusat pertanggungjawaban secara luas mengatakan bahwa pusat pertanggungjawaban sebagai bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, atau dana investasi. Pusat pertanggungjawaban adalah merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu.

Pertanggungjawaban merupakan bagian dari unit organisasi, dimana manajer harus bertanggungjawab dan memiliki kendali atas biaya, penerimaan, atau dana investasi terhadap segala aktivitas yang dilakukannya atau berdasarkan tanggungjawabnya. Unit-unit kegiatan yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di dalamnya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang menjalankan fungsi yang dibebankan kepadanya dan mempertanggungjawabkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, termasuk adanya biaya-biaya yang dibatasi dan dikendalikan melalui anggaran. Terdapat empat jenis utama pusat pertanggungjawaban yaitu: pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang ukuran prestasi manajernya didasarkan pada biayanya (nilai masukan). Setiap pusat pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam bentuk pendapatan [33][34][35][36][37].

Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer pusat biaya tersebut tidak dapat bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya tersebut. Hubungan antara masukan dengan keluarannya, pusat biaya dibagi lebih lanjut menjadi dua yaitu:

- (a) Pusat Biaya teknik. Pusat biaya teknik, adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. Contoh pusat biaya teknik adalah departemen produksi. Manajer pusat biaya teknik diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh dia dapat mempertahankan dan mengembangkan efisiensinya.
- (b) Pusat Biaya Kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. Contoh pusat biaya kebijakan adalah departemen akuntansi, departemen pemasaran, departemen personalia, dan departemen hubungan masyarakat. Pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur prestasinya

berdasarkan efisiensinya karena tidak adanya hubungan yang nyata antara masukan dan keluaran atau karena keluaran pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

[38][39] Pusat Pendapatan yaitu pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang ukuran prestasinya didasarkan pada pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan adalah departemen pemasaran. Pusat Laba yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya. Dalam akuntansi keuangan pendapatan hanya diakui dan dicatat pada saat pendapatan tersebut direalisasikan melalui transaksi penjualan produk atau jasa kepada pihak luar perusahaan. Pusat Investasi yaitu pusat investasi adalah pusat laba yang diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ukuran ini disebut *return on investment* (ROI) dimana laba dibagi dengan investasi atau diukur dengan menggunakan residual income dimana laba dikurangi dengan beban modal (*capital charge*) atau produktivitas yang merupakan ratio antara keluaran dengan masukan [40][41].

## Kesimpulan

Pemerintah daerah melaksanakan kebutuhan daerah melalui APBD guna mendorong pusat perekonomian daerah maju dan berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Akibat pandemi, kondisi ekonomi daerah ikut terdampak sehingga penerimaan daerah terganggu baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Terutama bagi daerah yang sumber pendapatannya dari sektor pariwisata. Pandemi Corona juga berdampak pada penurunan anggaran transfer daerah terutama dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga mempengaruhi APBD dari sisi penerimaan daerah. Daerah akan mengalami kekurangan pada penerimaan yang cukup besar. Sehingga dengan adanya peningkatan pada defisit ini diharapkan agar daerah dapat menutupi kebutuhan anggarannya. Untuk menutup pembiayaan defisit APBD 2021 berasal dari pinjaman daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah. Proporsi belanja daerah. Dapat dilihat pada informasi akuntansi keuangan ini diperlukan oleh pihak luar untuk pengambilan keputusan guna menentukan hubungan antara public dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Informasi akuntansi keuangan ini dihasilkan oleh sistem informasi keuangan yang disebut akuntansi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan dua fungsi pokok manajemen dalam hal perencanaan dan pengendalian kegiatan pemerintah daerah. Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan dalam berbagai laporan keuangan seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut kegiatan, dan laporan biaya pemasaran.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada pada kabupaten/kota di Sumatera yang bekerja pada Sembilan bidang APBD semoga mereka sehat, bekerja dengan jujur transparan dan akuntabel guna mendukung pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

**Daftar Pustaka**

- [1] A. Susanto, "What Factors Influence The Quality of Accounting Information?," *IJABER*, vol. 13, no. 6, pp. 3995–4014, 2015.
- [2] H. S. Sudarsana and S. N. Rahardjo, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)," *Diponegoro J. Account.*, vol. 2, no. 4, pp. 175–187, 2013.
- [3] L. W. Porter, R. M. Steers, R. T. Mowday, and P. V. Boulian, "Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians.," *J. Appl. Psychol.*, vol. 59, no. 5, pp. 603–609, 1974, doi: 10.1037/h0037335.
- [4] Seknas Fitra, "Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran," *SEKNAS FITRA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*, 2015. [Online]. Available: <https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/?lang=en>. [Accessed: 29-Nov-2021].
- [5] V. Suryanto, "Defisit APBD tahun 2021 diperlebar karena penerimaan daerah terganggu," *kontan.co.id*, 2020. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbd-tahun-2021-diperlebar-karena-penerimaan-daerah-terganggu>. [Accessed: 29-Nov-2021].
- [6] Rudianto, *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- [7] L. E. E. M. Mandell, "Performance Measurement and Management Tools in North Carolina Local Government: Revisited," *Public Adm. Q.*, vol. 21, no. 1, pp. 96–127, Nov. 1997.
- [8] M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- [9] D. J. Bernstein, "Local government measurement use to focus on performance and results," *Eval. Program Plann.*, vol. 24, no. 1, pp. 95–101, 2001, doi: [https://doi.org/10.1016/S0149-7189\(00\)00050-1](https://doi.org/10.1016/S0149-7189(00)00050-1).
- [10] Mulyadi, *Akuntansi manajemen : konsep, manfaat dan rekayasa*, Third edit. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- [11] R. H. Garrison, *Akuntansi Manajerial*, Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [12] D. R. Hansen and M. M. Mowen, *Akuntansi Manajemen*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1999.
- [13] D. Greiling, "Performance measurement in the public sector: the German experience," *Int. J. Product. Perform. Manag.*, vol. 54, no. 7, pp. 551–567, Jan. 2005, doi: 10.1108/17410400510622223.
- [14] A. Halachmi, "Performance measurement is only one way of managing performance," *Int. J. Product. Perform. Manag.*, vol. 54, no. 7, pp. 502–516, Jan. 2005, doi: 10.1108/17410400510622197.
- [15] A. S. Dunk, "The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack," *Account. Rev.*, vol. 68, no. 2, pp. 400–410, Nov. 1993.
- [16] Supriyati, R. S. Bahri, and E. Komarudin, "Computerized of International Financial Report Standard for Good Governance in Small Medium Enterprises," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2019, vol. 662, no. 5, doi: 10.1088/1757-899X/662/5/052009.
- [17] G. Bassellier, B. H. Reich, and I. Benbasat, "Information Technology Competence of Business Managers: A Definition and Research Model," *J. Manag. Inf. Syst.*, vol. 17, no. 4, pp. 159–182, 2001, doi: 10.1080/07421222.2001.11045660.
- [18] A. Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya, 2013.
- [19] D. R. Hansen and M. M. Mowen, *Akuntansi Manajerial Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- [20] J. B. Carr and R. S. Browner, "Principled Opportunism: Evidence From The Organizational Middle," *Public Adm. Q.*, vol. 24, no. 1, pp. 109–138, 2000.
- [21] R. N. Anthony and V. Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- [22] S. Supriyati and D. Rizky, "Model Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Budidaya Perikanan Berbasis SAK EMKM dan Android," *@is Best Account. Inf. Syst. Inf. Technol. Bus. Enterp.*, vol. 3, no. 2, pp. 301–315, 2018, doi: 10.34010/aisthebest.v3i2.1526.
- [23] J. Ballantine, M. Levy, A. Martin, I. Munro, and P. Powell, "An ethical perspective on information systems evaluation," *Int. J. Agil. Manag. Syst.*, vol. 2, no. 3, pp. 233–241, Jan. 2000, doi: 10.1108/14654650010356149.
- [24] P. Baltzan, *Business Driven Information Systems*. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
- [25] L. Hertati, "Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia," *Res. J. Financ. Account.*, vol. 6, no. 8, pp. 12–18, 2015.
- [26] S. Heriningsih and Marita, "Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)," *J. Manajemen, Akunt. dan Ekon. Pembang.*, vol. 11, no. 1, pp. 67–78, 2013.
- [27] A. I. Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- [28] E. Julitawati, Darwanis, and Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh," *J. Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 1, no. 1, 2012.
- [29] I. Ghozali, *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- [30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [31] D. Suhardjanto and R. R. Yulianingtyas, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)," *J. Akunt. dan Audit.*, vol. 8, no. 1, pp. 30–42, 2011, doi: <https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.30-42>.
- [32] R. Rusmin, E. W. Astami, and G. Scully, "Local government units in Indonesia: Demographic attributes and differences in financial condition," *Australas. Accounting, Bus. Financ. J.*, vol. 8, no. 2, pp. 88–109, 2014, doi: 10.14453/aabfj.v8i2.7.
- [33] J. U. J. Onwumere, I. G. Ibe, and O. C. Ugbam, "The Impact of Working Capital Management on Profitability of Nigerian Firms: A Preliminary Investigation," *Eur. J. Bus. Manag.*, vol. 4, no. 15, pp. 2222–2839, 2012.
- [34] J. Lee, "Preparing Performance Information in The Public Sector: An Australian Perspective," *Financ. Account. Manag.*, vol. 24, no. 2, pp. 117–149, May 2008, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00449.x>.
- [35] L. Hertati, W. Zarkasy, M. Adam, H. Umar, and H. Suharman, "Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget," *Ilomata Int. J. Tax Account.*, vol. 1, no. 4, pp. 193–209, 2020, doi: 10.52728/ijtc.v1i4.131.
- [36] E. Kure, "UMKM Harus Melek Digital di Era Pandemi," *beritasatu.com*, 2021. [Online]. Available: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/731133/umkm-harus-melek-digital-di-era-pandemi>. [Accessed: 28-May-2021].
- [37] L. Hertati, "Impact of Uncertainty of Environment and Organizational Cultural on Accounting Information System Management and Implications for Managerial Performance," *Int. J. Econ. Commer. Manag.*, vol. III, no. 12, pp. 455–468, 2015.
- [38] R. Bennet, "Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's 'Big Bang', 1998 - 2010,"

- Innov. Sussessful Soc.*, pp. 1–11, 2010.
- [39] H. Lesi and O. Safkaur, “The Influence of Information Technology Covid-19 Plague Against Financial Statements and Business Practices,” *Ilomata Int. J. Tax Account.*, vol. 1, no. 3, pp. 122–131, 2020, doi: 10.52728/ijtc.v1i3.117.
- [40] L. Hertati, A. Susanto, W. Zarkasyi, H. Suharman, and H. Umar, “Penguujian Empiris Bagaimana Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Yang Dipengaruhi Oleh Etika Organisasi Berimplikasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi,” *J. Ilm. Akunt. Rahmaniyah*, vol. 3, no. 1, p. 88, 2020, doi: 10.51877/jiar.v3i1.95.
- [41] N. A. Bagranoff, M. G. Simkin, C. A. Strand, and C. S. Norman, *Core Concepts of Accounting Information Systems*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.